

SELAMA PANDEMI TIDAK ADA TRANSAKSI

September, Program 'Nglarisi' Siap Digenjot

YOGYA (KR) - Program 'Nglarisi' berupa pemesanan jamuan makan minum di lingkungan Pemkot Yogya, siap digenjot mulai September. Terutama setelah penetapan APBD Perubahan 2020. Selama pandemi virus Korona, nyaris tidak ada transaksi karena semua anggaran makan minum direalokasi.

Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogya Wahyu Handoyo, mengungkapkan layanan 'Nglarisi' sampai saat ini sebenarnya masih sangat terbuka. Baik penambahan jumlah kelompok dari wilayah maupun penerimaan pesanan.

"Hanya memang komoditasnya masih belum bisa bergerak dikarenakan rasionalisasi anggaran untuk

penanganan Covid-19," ungkapnya, Selasa (11/8).

Akan tetapi intensifikasi komoditas dan layanan akan segera ditingkatkan lagi setelah penetapan APBD Perubahan 2020 atau mulai September. Akan tetapi total alokasi anggaran yang dituangkan dalam perubahan anggaran belum bisa dipastikan. Saat ini sejumlah organisasi

perangkat daerah (OPD) masih melakukan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) bersama mitra kerja di dewan.

Sebelumnya, total alokasi anggaran untuk jamuan makan minum di lingkungan Pemkot Yogya cukup besar yakni mencapai Rp 40 miliar. Wahyu mengatakan, dalam dua bulan pertama yakni Januari dan Februari, serapan anggaran jamuan makan minum melalui 'Nglarisi' cukup tinggi. Pada Januari tercatat Rp 668 juta, dan Februari melonjak dua kali lipat menjadi Rp 1,36 miliar. Sedangkan pada Maret hingga

pertengahan bulan serapannya juga sudah mencapai Rp 1,15 miliar.

"Sejak pertengahan Maret begitu ada kebijakan pembatasan sosial, hampir tidak ada lagi pertemuan yang melibatkan banyak orang. Bahkan setiap rapat kini tidak bertemu muka melainkan melalui teleconference," imbuhnya.

Sedangkan jumlah anggota 'Nglarisi' tercatat ada 219 kelompok. Akan tetapi setiap bulan cukup dinamis karena ada penambahan dari wilayah. Tiap anggota kelompok harus terdiri dari keluarga miskin karena salah satu tujuan dibentuknya 'Nglarisi' ialah pengentasan kemiskinan melalui konsep Gandeng Gendong. **(Dhi)-f**

Bisnis Daring, Solusi Efektif Pemasaran Produk

YOGYA (KR) - Bisnis daring atau online kini menjadi salah satu solusi yang efektif dalam sistem penjualan produk di masa pandemi. Bisnis daring mengandalkan teknologi digital untuk mengenalkan produk kepada konsumen secara dekat tanpa perlu bertemu secara langsung.

Wisnu Hermawan SP MT, Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM DIY mengatakan, meskipun ada ketersediaan bahan ataupun kegiatan produksi, namun para pelaku usaha tidak bisa mengakses pasar karena konsumen dibatasi ruang geraknya. Maka salah satu solusi agar pelaku usaha bisa memasarkan produknya adalah melalui transaksi digital.

Dijelaskan, kegiatan pemulihan ekonomi diawali dengan survei usaha mikro melalui aplikasi SiBakul Jogja oleh Diskopukm DIY yang menunjukkan 2.331 dari 44.299 mitra UKM dan 512 dari 2.574 mitra koperasi terdampak pandemi dan kehilangan pasarnya. "Di masa-masa pandemi bisnis daring terbukti efektif. Apabila seorang wirausaha mau bertahan maka harus kreatif dan mau bertransformasi usahanya. Jualannya tidak konvensional, akan tetapi harus digital. Dengan catatan tata kelola bisnisnya diatur, membranding produknya supaya menarik sehingga bisnis online dapat berjalan lancar terang Wisnu dalam keterangan tertulis yang diterima *KR*, Selasa (11/8).

Senada dengan Diskopukm DIY, Ketua Komisi B DPRD DIY Danang Wahyu Broto SE MSI berujar, bisnis daring menjadi trend di tengah kondisi saat ini. Diharapkan sektor riil atau UMKM bidang produk maupun jasa harus mulai menggeluti bisnis yang bersifat daring atau online. Lebih lanjut Danang mengatakan, di antara keuntungan bisnis online adalah pelaku usaha dapat menjangkau konsumen secara lebih luas. Berbeda jika hanya mengandalkan penjualan secara offline pelaku usaha hanya dapat menjangkau konsumen yang ada di sekitar.

Selain itu omzet dari hasil penjualan akan meningkat dibandingkan dengan menjual secara konvensional, keuntungan lainnya modal relatif kecil dan mudah dilakukan oleh siapa saja. Selain itu kualitas produk, harga yang kompetitif, strategi, keefisien waktu pengiriman menjadi keunggulan dari bisnis online. "Saya kira peluang bisnis daring menjadi potensi cukup bagus dan harus diikuti oleh bisnis sektor lainnya. Pemerintah juga harus mensupport, memfasilitasi maupun menstimulus untuk bisnis yang menjadi teknologi sebagai basisnya. Bisa berbentuk pelatihan penggunaan teknologi informasi dan sebagainya" ujar Danang. **(Dev)-f**

LPJK DIY Terbaik Nasional

YOGYA (KR) - Secara nasional data tahun 2019 menyebutkan, tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat baru sekitar 9%. Sementara di DIY, angkanya lebih tinggi dari angka nasional, sekitar 15%. Meski demikian, data ini dinilai tetap masih kecil. Mengingat sejak beberapa tahun terakhir ini kebutuhan tenaga konstruksi sangat tinggi, karena tingginya pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) DIY Dr Widodo Brontowiyono mengemukakan hal tersebut pada media, di ruang kerjanya, Bumijo, Selasa (11/8). Hal tersebut dikemukakan berkait penobatan LPJK DIY sebagai LPJK Terbaik, juara 1 dari LPJKN, 2020. Penilaian dalam hal kinerja SDM terutama dalam rangka percepatan sertifikasi dan registrasi baik untuk tenaga kerja konstruksi dan badan usaha dan dilaksanakan dalam rangka HUT ke-21 LPJK, 9 Agustus lalu.

Menurutnya, aspek penilaian meliputi kinerja pelayanan selama masa Covid-19 terdiri dari koordinasi, kecepatan & ketepatan. Jika ada kasus, pelayanan sertifikasi & registrasi online SBU (sertifikat badan usaha)- SKA (sertifikat kompetensi ahli) dan SKT (sertifikat kompetensi trampil). Seorang tenaga kerja konstruksi dinyatakan

kan kompeten apabila telah memenuhi syarat tertentu, dengan dibuktikan bahwa orang tersebut secara *knowledge, skill dan attitude* dinyatakan kompeten atau lulus dalam proses asesmen. Proses sertifikasi yang dikenal sebagai ujian sertifikasi meliputi aspek portofolio, uji tulis, dan praktik serta wawancara.

Widodo menyebutkan, berkat program percepatan sertifikasi ini, LPJK DIY sudah menerapkan system online bahkan sejak sebelum ada Covid 19 ini. iBegini ada pandemi, kegiatan pelayanan sertifikasi di LPJK DIY relative tidak terpengaruh, karena sudah terbiasa dengan metode online. Kecuali untuk jabatan kerja tertentu memang harus ada yang dengan system offline, kata Ketua LPJK DIY yang juga Dosen FTSP UII. Tentu saja, jelas Widodo, keberhasilan ini tidak lepas dari seluruh tim yang ada.

Sesuai perkembangan di dunia jasa konstruksi yang sangat dinamis, UU no 18/1999 diganti dengan UU no 2 thn 2017. UU yang baru ini mengamanatkan salah satunya adalah bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi, baik yang trampil ataupun yang ahli wajib hukumnya untuk memiliki sertifikat kompetensi. Dan LPJK disebutkan sudah menyelenggarakan program percepatan sertifikasi kompetensi. **(Fsy)-f**



KR-Ardhi Wahdan
Wahyu Hendratmoko bersama Fantoni mengamati koleksi pojok baca Cantika.

YOGYA (KR) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogya kembali menghadirkan pojok baca di tempat ibadah. Kali ini rak yang berisi ribuan eksemplar buku dihadirkan di Klenteng Poncowinatan. Tempat ibadah diharapkan mampu menjadi agen pendidikan guna memperkuat predikat Kota Yogya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogya Wahyu Hendratmoko, menjelaskan pojok baca sebelumnya juga sudah menyasar masjid dan gereja. "Sekarang kami hadirkan di

Klenteng Poncowinatan untuk menciptakan nuansa membaca walaupun di tempat ibadah. Kami meyakini semua agama mengajarkan umatnya untuk terus belajar," ujarnya di sela meresmikan pojok baca tersebut, Selasa (11/8).

Pojok baca itu pun dilabeli Cantika, kependekan dari cintailah kegiatan membaca di Klenteng Poncowinatan. Total ada 1.500 eksemplar yang merupakan koleksi perpustakaan maupun sumbangan masyarakat. Seminggu sekali, pustakawan akan

mengecek koleksi dan setiap dua bulan dilakukan roling koleksi buku agar semakin bervariasi.

Wahyu mengaku, total terdapat 10 pojok baca yang sudah difasilitasi di tempat ibadah maupun ruang publik. Meski hanya untuk dibaca di tempat namun pihaknya tidak mengkhawatirkan jika ada koleksi buku yang dibawa oleh pembaca. "Bagi kami, mendekatkan layanan membaca di tengah masyarakat adalah kewajiban. Atmosfer pendidikan berupa minat baca memang harus tercipta sesuai arahan bapak walikota," katanya.

Sementara pemerhati Klenteng Poncowinatan Fantoni, mengapresiasi langkah Pemkot Yogya tersebut. Menurutnya, sesuai arti harfiah klenteng yakni tempat berkumpul untuk belajar, keberadaan pojok baca Cantika ini merupakan upaya yang tepat. Apalagi Klenteng Poncowinatan juga menyimpan sejarah warga Tionghoa di Yogya. **(Dhi)-f**

PADA PERINGATAN HUT KE-75 RI Tirakat, Patuhi Protokol Kesehatan

YOGYA (KR) - Perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020 akan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya selain bersamaan dengan pandemi Covid-19 dimana perayaan akan dibuat lebih sederhana, semua kegiatan yang dilakukan harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. "Saya berharap masyarakat yang mengadakan tirakat, tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam arti mereka (masyarakat) harus memakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak agar tidak timbul masalah baru. Kita wajib bersama-sama menaati aturan," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Selasa (11/8).

Sultan mengungkapkan, untuk lingkup pemerintahan, peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI diadakan pada 17 Agustus mendatang, berupa pengibaran bendera di Istana

Kepresidenan Gedung Agung. Setelah itu dilanjutkan menyaksikan peringatan detik-detik proklamasi dari Istana Negara pukul 10.00 WIB. Adapun beberapa kegiatan seperti resepsi, tirakatan dan lain-lain ditiadakan.

"Saya tidak akan melarang masyarakat, tapi tolong patuhi protokol kesehatan karena kondisinya (kasus Covid-19) masih fluktuatif di DIY. Oleh karena itu bagi masyarakat yang mau mengadakan kegiatan wajib mematuhi protokol kesehatan," ungkap Sultan.

Terkait Instruksi Presiden yang mengatur adanya sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan, Sultan memastikan belum akan sampai menjadikannya regulasi tingkat provinsi. Karena pengertian sanksi dalam Inpres dimungkinkan, artinya bisa dilakukan bisa tidak. Kendati begitu, pihaknya mempersiapkan jika kota dan kabupaten menerapkan sanksi tersebut. **(Ria)-f**



PENGUMUMAN

Dalam rangka mewujudkan komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik kepada Nasabah, maka berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) :

- No. 5-488/KO.031/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Relokasi Kantor Cabang Pembantu Univ. Gadjah Mada Yogyakarta
- No. 5-489/KO.031/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Relokasi Kantor Fungsional BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Yogyakarta
- No. 5-490/KO.031/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Relokasi Kantor Fungsional BNI Sentra Kredit Konsumer (LNC) Yogyakarta

Dengan ini diumumkan kepada Nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai berikut :

- Kami merencanakan melakukan pemindahan alamat Kantor beserta ATM yang berada di Kantor tersebut sebagai berikut :

Nama	
1. BNI KCP Univ. Gadjah Mada 2. BNI Sentra Kredit Kecil Yogyakarta (SKC Yogyakarta) 3. BNI Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta (LNC Yogyakarta)	
Alamat Kantor Lama	Alamat Kantor Baru
Kompleks UGM Bulaksumur Blok H-4 No,24 Caturtunggal, Depok, Sleman	Kompleks UGM Jl. Persatuan Sekip Blok L-4 Sinduadi, Mlati, Sleman

- Pemindahan alamat kantor berikut ATM yang berada di kantor tersebut akan kami laksanakan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2020

Demikian agar maklum. Atas perhatian dan kepercayaan kepada BNI kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang UGM Yogyakarta



DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA Telp. (0274) 540650

BERI KEPASTIAN WARGA AGAR TAK TERBEBANI Perda PBB dan BPHTB Masuk Target Revisi

YOGYA (KR) - Peraturan daerah (perda) terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akhirnya masuk target revisi. Hal ini seiring keputusan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogya yang memasukkannya dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun ini.

Anggota Fraksi PAN yang juga Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogya Tri Waluko Widodo, menjelaskan dari sisi kuantitas jumlah Propemperda 2020 tidak ada perubahan. "Jumlahnya tetap sembilan program perda. Tetapi ada dua program yang terpaksa kita *drop* kemudian digantikan dua program yang menurut kami mendesak, yakni perubahan Perda PBB dan Perda BPH-TB," jelasnya.

Dua program perda yang sebelumnya masuk dalam Propemperda 2020 namun ditunda ialah perubahan perda tentang PD Jogiatama Vishesha, dan rancangan perda pengelolaan sarana prasarana utilitas umum. Keduanya akan diusulkan kembali pada Propemperda 2021.

Sementara perubahan Perda PBB dan Perda BPHTB, imbuh Widodo, dinilai sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini. Apalagi setelah di-



KR-Istimewa

Tri Waluko Widodo

lakukan penyesuaian tarif hingga menyebabkan kenaikan pajak hingga menuai polemik di masyarakat.

"Ditambah adanya pandemi Covid-19 yang turut berdampak terhadap sektor perekonomian. Sehingga dengan adanya perubahan Perda PBB dan Perda BPHTB, kami ingin memberikan kepastian hukum kepada warga agar tidak terbebani," urainya.

Perubahan mendasar yang akan dilakukan pembahasan antara tim eksekutif dengan dewan ialah terkait pasal yang berisi koefisiensi pengali. Dengan begitu nantinya akan berdampak signifikan terhadap

penurunan tarif PBB maupun BPH-TB. Besaran pokok PBB maupun pajak BPHTB ialah mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi objek tidak kena pajak. "Nanti koefisiensi pengali yang akan direvisi atau diubah. Tentunya berdasarkan kajian supaya wajib pajak tidak terbebani namun pendapatan daerah juga optimal," tandas Widodo.

Dirinya menargetkan, perubahan Perda PBB dan Perda BPHTB dapat dibahas pada triwulan ketiga. Jajaran Bapemperda juga akan mengawal kinerja panitia khusus (pan-sus) agar pembahasannya benar-benar tuntas dan memperhatikan aspek keberpihakan terhadap masyarakat.

Dengan adanya revisi atau perubahan kedua perda terkait pajak tersebut polemik terkait tarif PBB di masyarakat bisa terurai. Namun demikian, tim eksekutif juga harus menjalin koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kaitannya dengan penentuan zona nilai tanah. "Pajak memang menjadi kewajiban setiap warga negara agar pembangunan tetap berjalan. Tetapi penentuan tarifnya juga harus mempertimbangkan kemampuan warga. Kami di lembaga dewan akan konsisten mengawalnya," katanya. **(Dhi)-f**